

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR CIBITUNG PERMAI
TAHUN 2023**



**Jalan Cinere Raya Blok A Kav.24 Cinere, Cinere, Kota Depok
TELEPON: 021-7546400**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG - Good Corporate Governance) di PT. BPR Cibitung Permai pada tahun 2023 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2023 ditengah pemulihan atas dampak pandemi COVID-19 yang menekan dunia usaha dan perbankan. BPR Cibitung Permai memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga BPR Cibitung Permai dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan khususnya di kota Depok. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR Cibitung Permai didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral dalam penerapan Penerapan Tata Kelola di lingkungan BPR Cibitung Permai. BPR Cibitung Permai senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR Cibitung Permai selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan. Di sepanjang 2023 dan untuk di tahun-tahun mendatang, BPR Cibitung Permai terus berupaya untuk mewujudkan hal-hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Janto Suhanto
	NIK	:	3172012301660002
	Jabatan	:	Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku - Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank - Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. - Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. - Menetapkan langkah – langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang – undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati – hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/ atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang – undangan lain. - Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang – undangan. - Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. - Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang – undangan lain yang relevan. - Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris. - Melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR. 		
2.	Nama	:	Herowati Meike Lestari

NIK	:	3174087005630004
Jabatan	:	Direktur
Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ul style="list-style-type: none"> - Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku - Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank - Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. - Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. - Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :		
Nihil		
Penjelasan Lebih Lanjut :		
Nihil		

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	Nama	: Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum
	NIK	: 3275047112560041
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris. 	
2.	Nama	: Shirley D. Lasut
	NIK	: 3173084910580005
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional 	

bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.
Rekomendasi Kepada Direksi :
a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital. d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2021. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	

BPR hanya memiliki Pejabat Eksekutif (PE) antara lain :

1. PE Audit Intern
2. PE Manajemen Risiko
3. PE Kepatuhan
4. PE APU PPT
5. PE Kredit
6. PE Operasional

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	BPR belum memiliki anggota komite	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
BPR belum memiliki program kerja komite dan realisasi program kerja komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Janto Suhanto	3172012301660002	Rp0	0%
2.	Herowati Meike Lestari	3174087005630004	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi tidak memiliki saham pada BPR				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Janto Suhanto	3172012301660002	-	-	0%
2.	Herowati Meike Lestari	3174087005630004	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki saham pada perusahaan lain					

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Janto Suhanto	3172012301660002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Herowati Meike Lestari	3174087005630004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada BPR					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Janto Suhanto	3172012301660002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Herowati Meike Lestari	3174087005630004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	3275047112560041	Rp700.000.000	14.89%
2.	Shirley D. Lasut	3173084910580005	Rp700.000.000	14.89%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Nihil				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	3275047112560041	-	-	0%
2.	Shirley D. Lasut	3173084910580005	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada perusahaan lain					

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan
-----	----------------------	-----	-------------------

			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	3275047112560041	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Shirley D. Lasut	3173084910580005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris tidak ada hubungan keuangan dengan BPR					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	3275047112560041	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Shirley D. Lasut	3173084910580005	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi tidak ada hubungan keluarga dengan BPR					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp270.529.800	2	Rp68.000.000
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp270.529.800		Rp68.000.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris dan Direksi hanya memiliki gaji.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Mobil (1)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (2)	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	BPJS Ketenagakerjaan (2)	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Fasilitas lain bagi Direksi adalah 1 Unit kendaraan Roda Empat (Mobil). Untuk Asuransi Kesehatan adalah BPJS Kesehatan untuk 2 Orang Direksi, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk 2 Orang Direksi			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2.47 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1.07 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.68 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1.87 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Nihil	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	22 Februari 2023	2	1. Laporan Bulanan dan Laba Rugi Posisi 31 Januari 2023 2. Mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar menggunakan plafon tersebut untuk membantu meningkatkan outstanding pinjaman

			<p>3. Menggiatkan Tim Penagihan Debitur - debitur bermasalah untuk memperkecil kerugian</p> <p>4. Tiap bulan mengirimkan laporan perkembangan Debitur - debitur bermasalah kepada Komisaris</p> <p>5. Harus segera menjual AYDA untuk memperkecil kerugian</p> <p>6. Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk Debitur - debitur yang benar-benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet</p> <p>7. Pelajari biaya-biaya yang bisa dikurangi</p>
2.	10 April 2023	2	<p>1. Laporan Bulanan dan Laba Rugi Posisi 31 Maret 2023</p> <p>2. Mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar menggunakan plafon tersebut untuk membantu meningkatkan outstanding pinjaman</p> <p>3. Menggiatkan Tim Penagihan Debitur - debitur bermasalah untuk memperkecil kerugian</p> <p>4. Tiap bulan mengirimkan laporan perkembangan Debitur - debitur bermasalah kepada Komisaris</p> <p>5. Harus segera menjual AYDA untuk memperkecil kerugian</p> <p>6. Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk Debitur - debitur yang benar-benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet</p> <p>7. Pelajari biaya-biaya yang bisa dikurangi</p>
3.	07 Juli 2023	2	<p>1. Laporan Bulanan dan Laba Rugi Posisi 30 Juni 2023</p> <p>2. Mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar menggunakan plafon tersebut untuk membantu meningkatkan outstanding pinjaman</p> <p>3. Menggiatkan Tim Penagihan Debitur - debitur bermasalah untuk memperkecil kerugian</p> <p>4. Tiap bulan mengirimkan laporan perkembangan Debitur - debitur bermasalah kepada Komisaris</p> <p>5. Harus segera menjual AYDA untuk memperkecil kerugian</p> <p>6. Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk Debitur - debitur yang benar-benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet</p> <p>7. Pelajari biaya-biaya yang bisa dikurangi</p> <p>8. Suhubungan dengan adanya hasil Pemeriksaan umum tahun 2023 terhadap PT. BPR Cibitung Permai maka Komisaris memberikan arahan kepada Direksi sesuai dengan yang diarahkan oleh OJK</p>
4.	18 September 2023	2	<p>1. Laporan Bulanan dan Laba Rugi Posisi 31 Agustus 2023</p> <p>2. Mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar menggunakan plafon tersebut untuk</p>

			membantu meningkatkan outstanding pinjaman 3. Menggiatkan Tim Penagihan Debitur - debitur bermasalah untuk memperkecil kerugian 4. Tiap bulan mengirimkan laporan perkembangan Debitur - debitur bermasalah kepada Komisaris 5. Harus segera menjual AYDA untuk memperkecil kerugian 6. Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk Debitur - debitur yang benar-benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet 7. Pelajari biaya-biaya yang bisa dikurangi
5.	11 Oktober 2023	2	1. Laporan Bulanan dan Laba Rugi Posisi 30 September 2023 2. Mengupayakan Debitur yang masih punya plafon pinjaman agar menggunakan plafon tersebut untuk membantu meningkatkan outstanding pinjaman 3. Menggiatkan Tim Penagihan Debitur - debitur bermasalah untuk memperkecil kerugian 4. Tiap bulan mengirimkan laporan perkembangan Debitur - debitur bermasalah kepada Komisaris 5. Harus segera menjual AYDA untuk memperkecil kerugian 6. Pemberian kredit baru sudah bisa dijalankan dengan catatan harus untuk Debitur - debitur yang benar-benar baik dan juga dapat mencari debitur yang mampu melakukan back to back sehingga tidak ada resiko macet 7. Pelajari biaya-biaya yang bisa dikurangi
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun : Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat setiap triwulan untuk mengevaluasi dan membahas atas hasil pengawasan terhadap operasional BPR terutama dari sisi kinerja BPR, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan hal hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum	3275047112560041	5	0	100%
2.	Shirley D. Lasut	3173084910580005	5	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut : Dewan Komisaris secara rutin mengadakan rapat setiap triwulan secara tatap muka untuk mengevaluasi dan membahas atas hasil pengawasan terhadap operasional BPR terutama dari sisi kinerja BPR, pelaksanaan fungsi Kepatuhan, pemantauan profil risiko, dan hal hal lain yang membutuhkan perhatian dan penjelasan dari Direksi.					

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Tidak ada Penyimpangan internal yang terjadi di BPR								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	1	0
Dalam Proses Penyelesaian	2	0
Total	3	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Telah disampaikan 3 kasus permohonan sita melalui Pengadilan Negeri Kota Depok. Pengadilan Negeri Kota Depok telah menyita 1 aset Debitur atas nama Pergasen. dan tinggal proses lelang. Untuk 2 Kasus masih dalam proses pengadilan.		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.	Audia	Kepala	3275042	Shirley D	Komisaris	3173084	Kredit	290 juta	Kredit

	Michael Septian	Divisi Bagian Hukum Protelindo	609860021	Lasut		910580005	Konsumtif (Pembelian Mobil Baru)	rupiah	disetujui oleh Komite Kredit dan diketahui salah satu Dewan Komisaris. Plafond Kredit sebesar Rp. 290.000.000. Tanggal Realisasi 24 Juni 2022 dan berakhir Tanggal 24 Juni 2026
2.	Herowati Meike Lestari	Direktur	3174087005630004	Emmy Sriharjanti	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit Konsumtif	170 juta rupiah	Kredit disetujui oleh Komite Kredit dan diketahui salah satu Dewan Komisaris. Tanggal Realisasi Kredit 22 Januari 2020 dan berakhir Tanggal 22 Januari 2027
3.	Shirley D Lasut	Komisaris	3173084910580005	Emmy Sriharjanti	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit PRK	200 juta rupiah	Kredit disetujui oleh Komite Kredit dan diketahui salah satu Dewan Komisaris. Tanggal Realisasi Kredit (Perpanjangan Kredit) 14 Desember

									2018 dan berakhir tanggal 14 Desember 2024
4.	PT. Sasana Angkasa Transit Hotel	Perhotelan	317502290766000	Emmy Sriharjanti	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit PRK	1.800 juta rupiah	Kredit disetujui oleh Komite Kredit dan diketahui salah satu Dewan Komisaris antara lain : 1. Tanggal Realisasi Kredit 15 Desember 2023 dan berakhir tanggal 15 Desember 2024 Plafon Rp. 1.000.000.000 2. Tanggal Realisasi Kredit 15 Desember 2023 dan berakhir tanggal 15 Desember 2024 Plafon Rp. 500.000.000 3. Tanggal Realisasi Kredit 15 Desember 2023 dan berakhir tanggal 15 Desember 2024 Plafon Rp. 300.000.000
5.	Lauw Ping	Pemegang Saham	31730818095600	Emmy Sriharjan	Komisaris Utama	32750471125600	Kredit PRK	2.000 juta rupiah	Kredit disetujui

			03	ti		41			oleh Komite Kredit dan salah satu Dewan Komisaris antara lain : 1. Tanggal Realisasi Kredit 22 Maret 2021 dan berakhir tanggal 22 Maret 2024 Plafon Rp. 1.000.000.000 2. Tanggal Berakhir Kredit 31 Agustus 2021 dan berakhir tanggal 31 Agustus 2024 Plafon Rp. 1.000.000.000
6.	PT Jayantara Setia Sejahtera	Konstruksi & Instalasi Jaringan Telekomunikasi	013260757029000	Emmy Sriharjanti	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit PRK	1.500 juta rupiah	Kredit disetujui oleh Komite Kredit dan diketahui salah satu Dewan Komisaris. Tanggal Realisasi Kredit 18 November 2021 dan berakhir tanggal 18 November 2024
7.	Turoyo	Supir Pribadi Audia Michael	3303043006840002	Emmy Sriharjanti	Komisaris Utama	3275047112560041	Kredit Konsumtif	40 juta rupiah	Kredit disetujui oleh Komite

		Septian							Kredit dan diketahui salah satu Dewan Komisaris. Tanggal Realisasi Kredit 10 April 2023 dan berakhir tanggal 10 April 2027
Penjelasan Lebih Lanjut :									
Kredit Pihak Terkait									

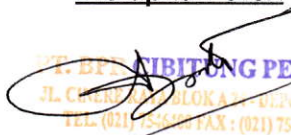
L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Tidak ada kegiatan pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik di tahun 2023					

Kota Depok, 22 Januari 2024

PT. BPR Cibitung Permai

Disiapkan Oleh


PT. BPR CIBITUNG PERMAI
Jl. Cinere Raya Blok A Kav. 24 - Depok, 16128
TEL: (021) 7546400 FAX: (021) 7543714

Janto Suhanto
Direktur Utama

Disetujui Oleh



Emmy Sriharjanti, S.H. M.Hum
Komisaris Utama